## GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

**TAHUN ANGGARAN: 2019** 

PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan Daerah			
KODE PROGRAM				
ANALISA SITUASI	<ol> <li>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)         <ul> <li>Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakar pendekatan top-down, bottom-up, teknokratik, politis, aspiratif.</li> <li>Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom-up dan aspiratif</li> <li>Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2017 dan 2018 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain: disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB IV dan BAB V.</li> </ul> </li> </ol>			
	Isu dan Faktor Kesenjangan Gender     a. Faktor Kesenjangan			
	Akses - Undangan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan Musrenbang minim			
	Partisipasi - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikati untuk seluruh komponen yang diundang.			
	Kontrol - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan			
	Manfaat     Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik.			
	b. Penyebab Internal			
	<ul> <li>Pengelola kegiatan belum responsif gender</li> <li>Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan</li> <li>Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang</li> </ul>			
	dibahas - Mindset perencana di Bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar Renstra tidak di perbolehkan			
	c. Penyebab Eksternal Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi Pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari			
	pada substansi pembahasan  - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim  - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan  - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah  - Musrenbang, belum, dianggan, sebagai, sesuatu, bal yang penting untuk			

- Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk

Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan

didukung oleh pengganggaran yang maksimal

CAPAIAN PROGRAM	Tolok Ukur     Jumlah OPD yang memiliki dokumen Gander Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)			
	2. Indikato - Terse		et Kinerja umen RKPD Tahun 2020 yang Responsif Gender	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 241.457.000			
RENCANA AKSI	Kegiatan	Masukan	ggaraan Musrenbang RKPD Rp 241.457.000,- Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2019	

KEPALA BAPPPEDA,

Drs. ANDY SUMANTO, CF/A NIP 19681220 199009 1 001

## Tim Verifikasi:

Α	
Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
<u>Drs. ANDY SUMANTO, ¢FrA</u> NIP 19681220 199009 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si. NIP 19820521 200012 1 002
Inspektur	Kepala BKD
KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	PARYANTO, S.Sos., M.T. NIP 10600600 108003 1 001
1411 1301 001 133103 1 004	NIP 19690609 198902 1 001